

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN BAZNAS DI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**NUR AINUN**

**NPM : 1401270018**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BAZNAS DI  
KAB.LANGKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Perbankan syariah*

**Oleh :**

**NUR AINUN  
1401270018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**



**Isra Hayati S.Pd, M.Si**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

Medan, 15 Maret 2018

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Nur Ainun  
**NPM** : 1401270018  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI , TANGGAL** : Selasa, 27 Maret 2018  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

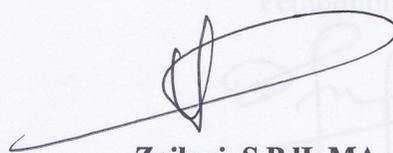
**PENGUJI I** : Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si  
**PENGUJI II** : Dodi Firman, SE, MM

### PANITIA PENGUJI

**Ketua**

  
Dr. Muhammad Qorib, MA

**Sekretaris**

  
Zailani, S.PdI, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Nur Ainun  
Npm : 1401270018  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kab.Langkat.

Medan, 15 Maret 2018

**Pembimbing Skripsi**

**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Disetujui Oleh:**

**Ketua Program Studi Perbankan Syariah**

**Dekan Fakultas Agama Islam**

**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**



Unggul Berprestasi & Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Nama Mahasiswa : Nur Ainun  
 Npm : 1401270018  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS di Kabupaten Langkat.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08-03-2018	- Perbaikan hasil penelitian - Perbaikan penyajian data faktor-faktor yg mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan	SP	
14-03-2018	- Perbaikan pembahasan - Perbaikan kesimpulan dan saran	SP	
15-03-2018	- Perbaikan abstrak - Perbaikan tulisan salah ketik	SP	
16-03-2018	- Acc sidang meja bimbingan skripsi	SP	

Medan, 15 Maret 2018

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

## KATA PENGANTAR



*Assalam 'mualaikum wr.wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis berusaha menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari pihak-pihak yang membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan bagi penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Hasahatan Hasibuan dan Ibunda Saniroh Lubis, serta keluarga yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Berkat do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan Proposal.
7. Seluruh staff serta Pegawai di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dalam mengerjakan proposal ini, Widia Nasution, Nurjamilah, dan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan proposal ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, dapat dibalas oleh Allah SWT. Dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta pembawa berkah bagi penulis.

***Wassalamu'alaikum wr.wb***

Medan,      Maret 2018  
Penulis

Nurainun Hasibuan  
(1401270018)

## ABSTRAK

**NUR AINUN, NPM. 1401270018. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BAZNAS DI KAB. LANGKAT”, FAKULTAS AGAMA ISLAM, PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH, UMSU. SKRIPSI. 2018.**

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS di Kab. Langkat. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan baznas di kab.langkat terdiri dari (1), kualitas sumber daya manusia badan amil zakat Kab.Langkat sudah memadai, karena latar belakang pendidikan karyawan sudah pada tingkat sarjana dan sesuai dengan kompetensinya. (2), penerapan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS kabupaten langkat belum memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, hal ini dikarenakan penomoran formulir bukti penerimaan dana yang tidak menggunakan penomoran dalam pencatatan penerimaan dana. (3), sistem pengendalian internal badan amil zakat nasional Kab.Langkat sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan pada badan amil zakat nasional Kab.Langkat. (4), penyajian laporan keuangan badan amil zakat Kab.Langkat setiap periodenya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. (5), bagian keuangan badan amil zakat nasional Kab.Langkat telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan pada badan amil zakat nasional Kab.Langkat yang berdasarkan PSAK No. 109 dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, dan Laporan Keuangan.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori .....	8
1. Akuntabilitas .....	8
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan .....	11
1. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	11
2. Penerapan Teknologi Informasi .....	16
3. Sistem Pengendalian Internal.....	18
4. Penyajian Laporan Keuangan .....	20
5. Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan .....	22
3. Laporan Keuangan .....	23
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Berpikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>

A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Sumber Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan .....	37
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan BAZNAS Kab.Langkat .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	39

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya kurang baik. Hal ini disebabkan basis ekonomi negara Indonesia yang strategis tersebut dimonopoli oleh kalangan masyarakat modern dengan menerapkan prinsip ekonomi konvensional (*ribawi*). Prinsip ekonomi konvensional tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat semakin ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian masyarakat yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini, sumber daya manusia dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan sumber daya manusia yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya. Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim kita.

Selain dikenal dua sistem ekonomi tersebut yaitu kapitalis dan sosialis, masyarakat juga mengenal sistem ekonomi lainnya yaitu sistem ekonomi Islam yang sebenarnya telah ada sejak 14 abad yang lalu. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Sistem ekonomi Islam, lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya lebih didasarkan atas sumber Islam, al-Quran, dan al-Hadits. Prinsip dasar ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument prinsip dasar ekonomi Islam dalam mendistribusi kekayaan untuk memenuhi pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono. "Konsep Ekonomi Islam". Diakses dari: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11096166.pdf>. (Diakses tanggal 08 oktober 2012).

Zakat adalah menyerahkan sebagian dari harta seorang muslim kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat juga merupakan ibadah pokok dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta yang cukup.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia, memiliki potensi zakat yang tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 menyatakan bahwa dari 237.641.236 jiwa terdapat 207.176.162 jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam.<sup>3</sup> Hal ini mengindikasikan adanya potensi zakat yang besar di Indonesia.

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam. Zakat juga aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat menjadi pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, akan tetapi penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat, disebabkan yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya melainkan hanya kedekatan emosi misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.<sup>4</sup>

Untuk mengelola penyerahan zakat secara tepat kepada mustahiq diperlukan sebuah badan amil zakat. Pada tahun 2000 setelah keluar Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

---

<sup>2</sup> Fathanul Hakim Risal. <http://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah-terhadap-baz-dan-laz>. Artikel (Diakses tanggal 24 juni 2015).

<sup>3</sup> Rachman Indrarini dan Aditya Surya Nanda. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil ZaKat, Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah". *Jurnal Akuntansi S1 Universitas Negeri Surabaya Vol 8 No 2, 2017*, h.2.

<sup>4</sup> Restu Prayudi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat". *Skripsi Akuntansi Program Sarjana UIN SUSKA RIAU, 2013*, h 2.

dibeberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat. Akan tetapi dalam realisasinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya masih suka rela bukan keharusan. Padahal instansi pemerintah hanyalah sebagian kecil dari bagian masyarakat umum islam, itupun belum seluruhnya instansi pemerintah menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan sebagian besar masyarakat umat islam adalah masyarakat bukan pegawai sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir kecil masyarakat yang dengan kesadarannya membayar zakat hartanya ke BAZ Provinsi ataupun BAZ Kabupaten atau Kota.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran badan amil zakat nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, badan amil zakat nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>5</sup> Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik, yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas badan amil zakat nasional. Sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai.

Badan Amil Zakat Nasional Kab.Langkat adalah badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Langkat. Pelaksanaan tugas-tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka badan amil zakat nasional Kab.Langkat diharuskan melaporkan kegiatan kepada Bupati

---

<sup>5</sup> M.Fuad Nasar. "Peran BAZNAS Sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan". Didapat dari: pusat.baznas.go.id (diakses tanggal 3 juli 2015).

Kab.Langkat pada tiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan September tahun berikutnya. Data penerimaan zakat yang diperoleh dari badan amil zakat nasional Kab.Langkat tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1 Penerimaan dana BAZNAS Kab.Langkat Tahun 2014**

No	Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah	Potensi per Tahun
1	<b>Realisasi Penerimaan</b>		
	a. Penerimaan dana zakat	Rp. 111.602.453,-	
	b. Penerimaan dana infaq	Rp. 1.159.847.410,-	
	c. Penerimaan dana non ZIS	Rp. 1.984.901,-	
	d. Penerimaan dana amil	Rp. 344.031.481,-	
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.617.466.245,-</b>	<b>2,5 Triliun</b>
2	<b>Realisasi Pendayagunaan</b>		
	a. Pendayagunaan dana zakat	Rp. 87.209.500,-	
	b. Pendayagunaan dana infaq	Rp. 1.041.989.846,-	
	c. Penggunaan dana non ZIS	Rp. 257.265,-	
	d. Penggunaan dana amil	Rp. 331.005.548,-	
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.460.462.159,-</b>	

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2014 penerimaan zakat masih sebesar 1,6 Milyar sedangkan potensi zakat pertahun lebih dari 2,5 Triliun.<sup>6</sup> Penerimaan zakat di Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan potensi zakat yang diterima oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Langkat. Beberapa permasalahan diantaranya adalah kinerja keuangan yang kurang baik. Fenomena

<sup>6</sup>Rachman Indrarini dan Aditya Surya Nanda. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil ZaKat, Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah". *Jurnal Akuntansi S1 Universitas Negeri Surabaya Vol 8 No 2, 2017*, h.2.

di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, sebagian masyarakat di Kab.Langkat mempengaruhi perkembangan pengelolaan zakat di sebabkan sebagian masyarakat masih meragukan akuntabilitas badan amil zakat, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Mereka beranggapan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut karena bercermin dari umumnya keadaan perekonomian di Indonesia.<sup>7</sup>

Mewujudkan akuntabilitas badan amil zakat diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. Badan amil zakat nasional Kab.Langkat diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar nasional yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pada penjelasan pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa opini kualitas akuntabilitas keuangan oleh BPK RI didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Di Kab.Langkat”, dimana Badan Amil Zakat Nasional Kab.Langkat menjadi objek penelitian.

---

<sup>7</sup> Restu Prayudi. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”. *Skripsi Akuntansi Program Sarjana UIN SUSKA RIAU*, 2013, h. 5.

<sup>8</sup> Made Bagus Febrianto, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bangli”. *E-journal Program S1 Akutansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol 8 No 2 Tahun 2017*, h. 1.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi masalah bahwa:

1. Masyarakat masih meragukan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kab.Langkat dilihat dari sisi pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Penerimaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kab.Langkat belum sesuai dengan potensi zakat pertahunnya.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarasannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya membatasi pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan badan amil zakat nasional di Kabupaten Langkat.

## **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan badan amil zakat nasional di Kabupaten Langkat?

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan badan amil zakat nasional di Kabupaten Langkat.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk meningkatkan pola pikir ilmiah dalam hal memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya di bidang akuntansi syariah.

## 2. Manfaat Bagi BAZNAS

Dapat digunakan sebagai acuan dalam hal lebih meningkatkan sisi akuntabilitas pengelolaan pada umumnya dan akuntabilitas laporan keuangan pada khususnya.

## 3. Manfaat Bagi Pihak Lain

Bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan lebih utama sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada pihak yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi pemupukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik agar dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban.<sup>9</sup>

Akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan kepada atasan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas sebagai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban.<sup>10</sup>

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

---

<sup>9</sup> Restu Prayudi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat". *Skripsi Akuntansi Program Sarjana UIN SUSKA RIAU, 2013*, h 10.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 13

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Aspek-Aspek Akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan  
Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah merupakan sebuah kontrak antara dua pihak
2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil  
Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan  
Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi  
Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja  
Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

Alat-alat Akuntabilitas sebagai berikut:

1. Rencana Strategis  
Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai

sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Strategik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional menentukan ukuran untuk mengawasi hasil dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3. Kesepakatan Kinerja

Kesepakatan kinerja di desain dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4. Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5. Penilaian Sendiri

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6. Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

## 7. Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Perangkat indikator akuntabilitas sebagai berikut :

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme *reward and punishment*

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan sebagai berikut:

### 1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai *komparatif*, nilai *kompetitif*, *generative*, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*. Sebagian masyarakat menyetarakan pengertian sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, personalia, dan kepegawaian.<sup>11</sup>

Sumber daya manusia yang berkualitas harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dapat melaksanakan tugas dengan baik, adanya bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup. Kualitas sumber

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, M.Si. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2009, h. 3.

daya manusia merupakan pilar penyangga utama serta penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Harus dipastikan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mampu memberikan kontribusi secara optimal.<sup>12</sup>

Nilai-nilai yang di butuhkan dalam diri setiap pegawai untuk mencapai keunggulan sumber daya manusia, meliputi:

a) Amanah

Amanah dalam memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

b) Profesional

Profesional dalam memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki tersebut.

c) Antusias dan bermotivasi tinggi

Antusias dan bermotivasi tinggi dalam menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil.

d) Bertanggung jawab dan mandiri

Bertanggung jawab dan mandiri dalam memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain.

e) Kreatif

Sumber daya manusia dikatakan kreatif jika memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang *variatif* terhadap setiap permasalahan.

f) Disiplin

Sumber daya manusia dikatakan disiplin apabila taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.

---

<sup>12</sup> Siti Sukaesih. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi Program Sarjana Universitas UIN SUSKA RIAU Vol 12 No 7, 2005*, h. 3.

g) Peduli dan menghargai orang lain

Peduli dan menghargai orang lain mampu menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.

h) Belajar sepanjang hayat

Belajar sepanjang hayat berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.<sup>13</sup>

Tujuan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Tujuan Kemasyarakatan/sosial.

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia yaitu agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap organisasi.

2. Tujuan Organisasional.

Tujuan organisasional departemen sumber daya adalah sasaran (target) formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Departemen sumber daya manusia dibentuk untuk membantu para manajer mencapai tujuan organisasi. Departemen sumber daya manusia meningkatkan efektivitas organisasional dengan cara berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik.
- b. Mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif seraya mampu mengendalikan biaya tenaga kerja.
- c. Mengembangkan dan mempertahankan kualitas kerja (*work life*) dengan membuka kesempatan bagi kepuasan kerja dan aktualisasi diri karyawan.

---

<sup>13</sup> Arsyati, Darwanis, Muslim A.Djalil. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Jawaban Keuangan PNBPN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah". *Jurnal S1 Akuntansi UPG Vol. 1, No. 1. Januari 2008, h. 5.*

- d. Memastikan bahwa perilaku organisasi sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dengan menyediakan kesempatan kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman dan perlindungan terhadap hak karyawan.
  - e. Membantu organisasi mencapai tujuannya.
  - f. Menyediakan organisasi bagi karyawan-karyawan yang termotivasi dan terlatih dengan baik.
  - g. Mengomunikasikan kebijakan sumber daya manusia kepada karyawan.
  - h. Membantu mempertahankan kebijakan etis dan perilaku yang bertanggung jawab secara social.
  - i. Mengelola perubahan sehingga saling menguntungkan bagi individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat.
3. Tujuan Fungsional.

Tujuan fungsional merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Departemen sumber daya manusia semakin dituntut menyediakan program-program rekrutmen, pelatihan, pengembangan yang inovatif serta menemukan pendekatan manajemen yang akan menahan dan memotivasi orang-orang terbaik.

4. Tujuan Pribadi.

Tujuan pribadi adalah tujuan dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi. Konflik antara tujuan karyawan dan tujuan organisasi dapat menyebabkan keinginan kerja yang lemah. Agar setiap tujuan perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, tujuan perusahaan harus diterima dulu oleh kalangan karyawan. Penerimaan (*goal acceptance*) merupakan prasyarat yang penting bagi terhadap tujuan perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi tersebut meningkatkan kontribusi para karyawan terhadap organisasi.

Berdasarkan uraian bisa disimpulkan bahwa departemen sumber daya manusia merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan yang dalam menjalankan tujuannya harus dapat menyesuaikan antar faktor eksternal dan faktor internal. Kedua factor ini saling memengaruhi antara satu dan lainnya.

Manfaat Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- 1) Organisasi dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam organisasi dengan lebih baik.
- 2) Melalui SDM yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih di tingkatkan jika SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Produktivitas dapat lebih ditingkatkan jika memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM.
- 4) Penanganan sistem informasi SDM dirasakan semakin penting sebab dengan tersedianya sistem informasi SDM yang valid dan reliabel akan lebih mudah organisasi (khususnya yang memiliki banyak cabang) untuk mengisi berbagai kekosongan di berbagai cabang.
- 5) Rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi.
- 6) Perencanaan SDM bermanfaat untuk tiga kepentingan , yakni kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional.

Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

Perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa mendatang. Melalui estimasi jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh seluruh bagian-bagian kepegawaian dapat menyusun rencana secara lebih baik dalam hal-hal yang maenjadi lingkup pekerjaannya, misalnya penarikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagainya. Perencanaan dalam MSDM berupaya menetapkan keperluan-keperluan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas untuk suatu periode waktu yang

pasti dan menentukan bagaimana keperluan-keperluan ini dapat terpenuhi. Memahami aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Kegiatan MSDM dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya.

#### 2) Pengorganisasian

Setelah program-program disusun dan ditetapkan, perlu dibentuk organisasi yang akan melaksanakan program-program tadi. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan oleh karena itu manajer personal harus membentuk satu organisasi dengan merancang struktur yang menggambarkan hubungan antara tugas-tugas antar pegawai dan antar faktor-faktor.

#### 3) Pengarahan

Disebut juga dengan pemberian motivasi atau pemberian komando agar pegawai mulai bekerja. Pada dasarnya fungsi ini akan menumbuhkan kemauan pegawai untuk mulai bekerja secara aktif. Pengarahan dalam hal ini terkait erat dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin akan berperan penting dalam mengarahkan anak-buah atau yang dipimpinya.

#### 4) Pengendalian

Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses pengendalian berupa observasi terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan di samping itu juga koreksi-koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama rencana sedang dilaksanakan.

### 2. Penerapan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi komputer yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirim informasi. Tujuan teknologi informasi menjamin ketercapaian tujuan atau target organisasi. Untuk mengidentifikasi tujuan penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan sistem pengukuran *balanced scorecard*. Dari sistem pengukuran ini, akan diperoleh beberapa proses manajemen penting, yakni:

- a) Menentukan visi dan strategi organisasi.
- b) Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
- c) Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.
- d) Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis.<sup>14</sup>

Manfaat teknologi informasi sebagai berikut:

1) Perbaikan *efisiensi*

Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan *efisiensi* diterapkan pada level operasional organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses.

2) Perbaikan *efektivitas*

Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan *efektivitas* diterapkan pada level manajerial organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi.

3) Perbaikan *strategic improvement*

Pemanfaatan teknologi informasi untuk *strategic improvement* atau perbaikan daya saing diterapkan pada level *eksekutif* organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan ketepatan pengambilan keputusan oleh eksekutif.<sup>15</sup>

Fungsi Teknologi informasi sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi sebagai Pengolah (*Processing*)

Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic dan sebagainya.

Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

---

<sup>14</sup> Heri, S.E., M.Si. "Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi". Jakarta: PT. Renika Cipta 2011, h. 100.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 102

2. Teknologi Informasi sebagai Menghasilkan (*Generating*)

Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, table, grafik dan sebagainya.

3. Teknologi Informasi sebagai Penyimpan (*storage*)

Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke harddisk, tape, disket, CD (compact disc) dan sebagainya.

4. Teknologi Informasi sebagai Pencari Kembali (*Retrifal*)

Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.

5. Teknologi Informasi sebagai Transmisi (*Transmission*)

Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya.

3. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dalam semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan untuk digunakan entitas dengan tujuan menjaga keamanan aset milik entitas, memeriksa ketelitian atau kebenaran data akuntansi, mendorong *efisiensi*, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan suatu organisasi harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, dengan pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Made Bagus Febrianto, Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bangli". *E-journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol 8 No 2 Tahun 2017*, h. 9.

<sup>17</sup> Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli. "Pengaruh Sistem Penendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur

Kerangka kerja sistem pengendalian internal terdiri dari lima unsur komponen yang saling terintegrasi (*Integrated Framework*) yakni:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. lingkungan pengendalian salah satu dari lima komponen pengendalian internal yang menyediakan jaminan wajar tentang pelaporan keuangan yang dapat diandalkan.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

3. Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko menetapkan dan melaksanakan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian mutu kinerja, yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti.<sup>18</sup>

Fungsi sistem pengendalian internal bagi organisasi sebagai berikut:

1. Menjaga aktiva (*safe guarding of assets*).

---

*Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia*". *Jurnal S1 Ak UNJA Vol. 3 No. 1, 2014*, h. 2.

<sup>18</sup> Eti Rochaety, Faizal Ridwan.Z, Tupi Setyowati. "*Sistem Informasi Manajemen*". Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2013, h. 90.

2. Mengecek keakuratan dan reliabilitas data akuntansi (*checking the accuracy and reliability of its accounting data*).
3. Meningkatkan efisiensi operasional (*promoting operational efficiency*).
4. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (*encourage adherence to prescribed managerial policies*).

Kriteria sistem pengendalian internal dalam organisasi sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memadai.
2. *Job* Deskripsi.
3. Rotasi kerja dan cuti berkala.
4. Penggunaan dokumen yang bernomor urut tercetak.
5. Adanya Divisi khusus Akuntansi yang terpisah dengan Bagian operasional.

Kelima kriteria tersebut dipakai untuk mengidentifikasi kepatuhan sistem pengendalian internal badan amil zakat nasional. Apabila semua kriteria ditaati pelaksanaan pengendalian internal dikatakan baik.<sup>19</sup>

Tujuan Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi operasional.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

#### 4. Penyajian Laporan Keuangan

PSAK No.101 Tahun 2009 mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Entitas Syariah termasuk didalamnya badan amil zakat nasional.<sup>20</sup> Ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, akuntabilitas laporan keuangan yang baik oleh BPK RI didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Standar Akuntansi

---

<sup>19</sup> Nikmatuniayah, Marliyati. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang". *Jurnal S1 AK Politeknik Negeri Semarang Vol 31 No 2, 2015*, h. 9.

<sup>20</sup> Nur Hisamuddin. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang". *Jurnal S1 Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember Vol 6 No 8, 2002*, H. 4.

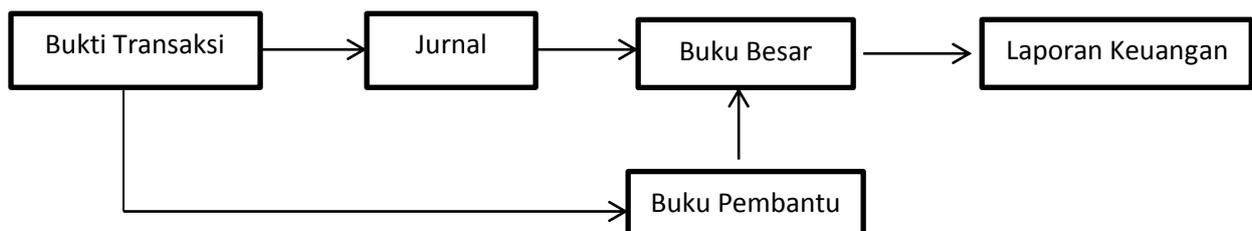
Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.<sup>21</sup>

Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Membuat neraca saldo dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit akuntansi.
2. Melakukan penyesuaian yaitu mencatat transaksi-transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja.
3. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.<sup>22</sup>

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar.
- (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
- (c) Penambahan dan pengurangan.
- (d) Saldo awal.
- (e) Saldo akhir.



**Gambar 2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan**

<sup>21</sup> Made Bagus Febrianto, Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bangli". *E-journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol 8 No 2 Tahun 2017*, h. 8.

<sup>22</sup> Nikmatuniyah, Marliyati. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang". *Jurnal S1 AK Politeknik Negeri Semarang Vol.31 No.2, 2015*, h. 3-4.

## 5. Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan penyajian laporan keuangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) No.7 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penyusunan laporan keuangan hingga penyajian laporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah mengisyaratkan keharusan penyajian laporan keuangan patuh terhadap peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan yang baik.<sup>23</sup>

Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan dasar dalam memberikan sebuah opini terhadap pengelolaan keuangan diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk menyajikan laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan pembaruannya PP Nomor 71 Tahun 2010.<sup>24</sup>

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia.
3. Undang-undang APBN.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.

---

<sup>23</sup> Made Bagus Febrianto, Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bangli". *E-journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 8 No: 2 Tahun 2017*, h. 8.

<sup>24</sup> Nuhoni Nalurita. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan, dan Karakteristik Daerah Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia". *Skripsi Akuntansi S1 Universitas Sebelas Maret, 2015*, h. 32.

5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

### **3.Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, pendapatan, perubahan ekuitas, dan arus kas. Informasi tersebut di ikuti dengan catatan agar membantu pengguna memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta pelaporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah yang mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan bersih nilai ekonomi perusahaan. Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

Adapun tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat

dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil perusahaan.

2. Informasi laporan keuangan perusahaan diperlukan untuk menilai dan meramalkan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi laporan keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu.

Manfaat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi

Dengan adanya laporan keuangan bisa menginstropeksi diri, apa saja kekurangan yang ada, apa saja kelalaian-kelalaian yang sudah diperbuat, sudah benarkah penggunaan dana yang ada. Sehingga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik, bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang ada dan bisa memenejamen keungan lebih baik lagi agar mampu memberikan manfaat. selain itu tahu apakah menunjukkan kemrosoton atau kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan.

2. Sebagai sebuah trobosan

Kehadiran laporan keuangan memberikan peluang dan bisa selalu open minded. Dengan melihat laporan keuangan, dapat mengetahui apa yang harus di lakukan. Ketika laporan keuangan memadai tidak perlu berfikir keras, hanya cukup meneruskan dan mengembangkannya. Jika terjadi kekurangan dana, berfikir dan mencari sebuah trobosan, bagaimana meningkatkan pendapatan atau dana yang di miliki, seperti mengadakan bazar, lelang biaya, dan masih banyak lainnya.

Karakteristik laporan keuangan antara lain:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatatakan relevan apabila memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi, selain itu relevan berarti informasi yang

memiliki feedback, manfaat prediktif, ketepatan waktu, dan kelengkapan.

## 2. Berkompeten

Dalam pembuatan laporan keuangan haruslah berkompeten, yang dimaksud berkompeten disini adalah pembuatan serta penyusunan dilaksanakan sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutupi, bisa diverifikasi (diuji) keasliannya, dan netral atau adil (tidak memihak pihak manapun).

## 3. Dapat dibandingkan

Pembuatan laporan keuangan harus bisa dibandingkan dengan laporan terkait karena dengan adanya perbandingan ini kita bisa menemukan kesalahan atau kekurangan untuk diperbaiki, sehingga selanjutnya tidak ada lagi kesalahan. Perbandingan ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Dari segi internal, laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan terdahulu dalam satu tempat atau lembaga, sedangkan dari segi eksternal suatu laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan lembaga lain asalkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama.

## 4. Mudah difahami

Laporan keuangan harus mudah difahami oleh pengguna atau yang melihat, karena hal ini berhubungan dengan kelangsungan hidup sendiri ataupun perusahaan, dalam pelaporannya laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan lingkungan operasi identitas pelaporan, serta adanya kemauan si pengguna untuk mempelajari lebih lanjut isi atau maksud dari laporan tersebut.

Prinsip-prinsip laporan keuangan sebagai berikut:

### 1. *Accounting Entity* (entitas)

Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah “entity” tertentu atau lembaga tertentu yang akan dilaporkan, bukan lembaga lainnya.

### 2. *Going Concern* (kontinuitas operasi)

Dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan (*entity*) yang dilaporkan terus beroperasi di masa masa yang akan

datang. Jika perusahaan dianggap tidak mampu melanjutkan usahanya harus diungkapkan oleh akuntan.

3. *Measurement* (Pengukuran)

Akuntansi adalah sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi (*Economic Resources*) dan kewajiban (*Liability*). Akuntansi harus mengukur hasil transaksi, ukuran yang dipakai adalah unit moneter.

4. *Time Period* (Periode Waktu)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Laporan harus memiliki batas waktu yang jelas.

5. *Monetary Unit* (Unit Moneter)

Pengukuran setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit uang.

6. *Accrual*

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya tanpa melihat apakah transaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum.

7. *Exchange Price* (Harga Pertukaran)

Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran pada saat terjadinya transaksi.

8. *Aproximation* (Penaksiran)

Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran. Seperti taksiran umur, taksiran harga, pemilihan prinsip yang digunakan, dan sebagainya.

9. *Judgment* (Pertimbangan)

Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian dalam laporan keuangan.

10. *General Purpose* (Bertujuan Umum)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakai khusus.

#### 4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan amil zakat nasional merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan amil zakat nasional dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, masa kerja selama 5 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran badan amil zakat nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan amil zakat nasional bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan amil zakat nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>25</sup>

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

---

<sup>25</sup> Sudirman, M.A. *“Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas”*. Malang: UIN Press, 2007, h.14.

7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu BAZNAS sebagai berikut:

#### Kebijakan Mutu

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
4. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
5. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
6. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

#### Tujuan Mutu

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.

6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri.
9. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Restu Prayudi	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan LAZ di Kota Pekanbaru	Penelitian ini Menggunakan Data Kuantitatif dan Penelitian Lapangan.	Mekanisme Kontrol, Pengalaman Amil benar-benar Mempengaruhi (Perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat di Kota Pekanbaru). <sup>26</sup>
2	Fitri Astria	Pengaruh Penerapan	Penelitian ini	Penerapan

<sup>26</sup> Restu Prayudi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat". *Skripsi, Program Sarjana UIN SUSKA RIAU Jurusan Akuntansi S1, 2013*, h 1.

		Standar Akutansi Zakat dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Lembaga Amil Zakat (Studi pada lembaga Amil Zakat Rumah Amal Salman ITB)	Menggunakan Data Kuantitatif dan Penelitian Lapangan.	standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. <sup>27</sup>
3	Muh Ashari Assaggaf	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar)	Penelitian ini Menggunakan Data Kuantitatif dan Penelitian Lapangan.	variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kota Makassar. <sup>28</sup>
4	Eha Nugraha	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan	Penelitian ini Menggunakan	Akuntabilitas dan Transparansi

<sup>27</sup> Fitri Astria. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Lembaga Amil Zakat". *Skripsi, Universitas Pasundan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1, 2015*, h. 1.

<sup>28</sup> Muh Ashari Assaggaf. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar)". *Skripsi, UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam S1, 2016*, h. 1.

		Kualitas Pelayanan Lembaga Zakat Terhadap Kepercayaan Serta Kepercayaan Terhadap Muzakki	Pelayanan Pengelola Terhadap Muzakki Pengaruh Muzakki Komitmen	Data Kuantitatif dan Penelitian Lapangan.	Tidak Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Sementara Kualitas Pelayanan Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki. <sup>29</sup>
5	Miftakhul Ilmi	Perlakuan Zakat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Amil Zakat di Muhammadiyah Sidoarjo	Akuntansi Untuk Lembaga di LAZ	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Laporan keuangan pada LAZISMU Sidoarjo disajikan secara sederhana untuk memudahkan pihak LAZISMU dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengetahui isi dari laporan

<sup>29</sup> Eha Nugraha. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Serta Pengaruh Kepercayaan Muzakki Terhadap Komitmen Muzakki”. *Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung Jurusan Akuntansi S1, 2015*, h 1.

				keuangan tersebut. <sup>30</sup>
--	--	--	--	----------------------------------

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah upaya BAZNAS Kabupaten Langkat dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS untuk membentuk Laporan Keuangan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat:



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**

---

<sup>30</sup> Miftakhul Ilmi. "Perlakuan Akuntansi Zakat Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di LAZ Muhammadiyah". *Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jurusan Akuntansi S1*, 2012, h. 1.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>31</sup> Melalui pendekatan deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang hendak diteliti.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat, yang berada di Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

**Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																
4	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■								
5	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				
6	Sidang																									■			

<sup>31</sup> Bambang Waluyo. "Penelitian Hukum Dalam Praktek". Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002, h15.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari BAZNAS Kabupaten Langkat di peroleh dengan cara:

#### 1) Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan Tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.<sup>32</sup> Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan BAZNAS Kab.Langkat untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

#### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa.<sup>33</sup>

### C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang di ambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri.<sup>34</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya.<sup>35</sup> Data sekunder yang digunakan penulis berupa Laporan Keuangan Tahun 2014, bukti, catatan.

---

<sup>32</sup>Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif". Jakarta: PT. Prenamedia, 2011, h 8

<sup>33</sup>Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif". Jakarta: PT. Prenamedia, 2011, h9

<sup>34</sup>Suharsini Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006, h 18.

<sup>35</sup>*ibid*, h 128-143

#### D. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan badan amil zakat nasional Kab.Langkat sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yaitu, sebuah temuan dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowcart dan sejenisnya yang paling sering digunakan menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Namun, tidak menutup kemungkinan penyajian data juga didukung dengan grafik, tabel maupun chart untuk melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Penarikan kesimpulan verifikasi yaitu kesimpulan yang dihasilkan dari dua proses sebelumnya diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat adalah badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 451.11-15/K/2016, BAZNAS Kab. Langkat merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat diharuskan melaporkan kegiatan kepada Bupati dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan September tahun berikutnya. Dalam konteks itulah Laporan Semester I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan/pengumpulan dan penyaluran pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola selama Tahun Anggaran 2017.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi semua pihak sehingga BAZNAS Kab. Langkat kedepan dapat menerima masukan yang berharga dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja BAZNAS Kab. Langkat pada Tahun Anggaran 2017. Di samping itu laporan ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya selama tahun 2016.

## **2. Visi dan Misi**

Visi BAZNAS Kab. Langkat

“Menjadi Lembaga Yang Amanah Sesuai Syar'i Dan Regulasi”

Misi BAZNAS Kab. Langkat

- a. Profesional (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dalam hal manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat
- b. Transparan tentang kinerja dan keuangan
- c. Akuntabel menurut akuntan publik dan akuntan syar'i tentang kinerja dan keuangan

## **3. Dasar Hukum**

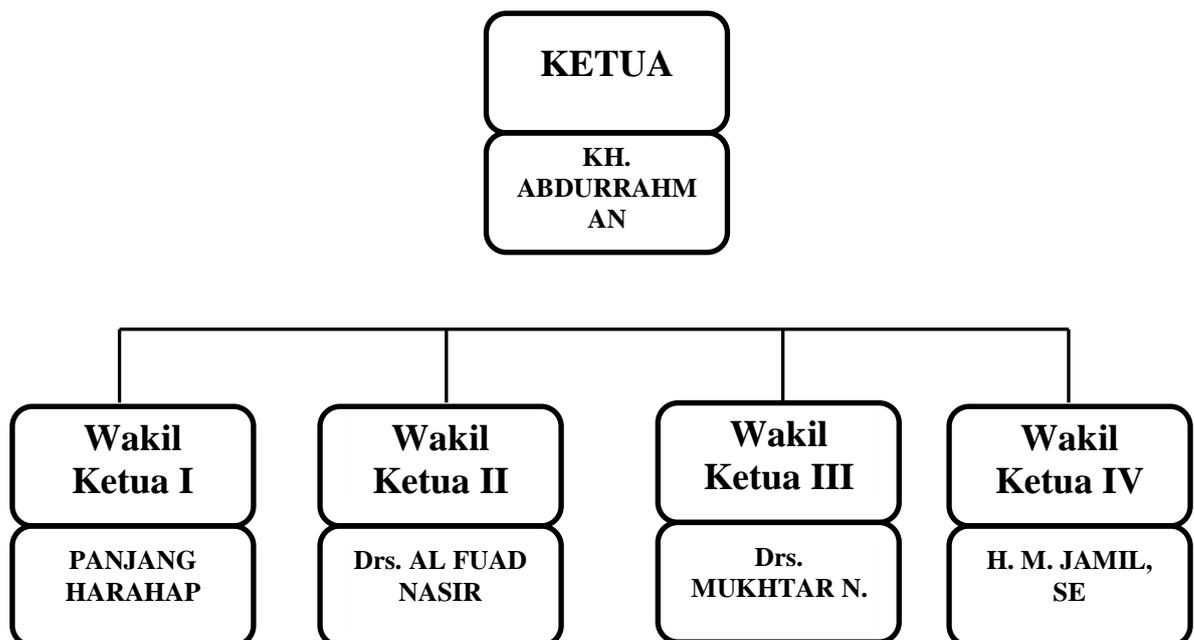
### **a. Ketentuan Agama**

- 1) Al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka".
- 2) Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 277 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendinkan sholat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya".
- 3) Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang sedang dalam perialanan".

#### b. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011
- 3) Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450-12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- 5) Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tahun 2010 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS
- 6) Surat Edaran Bupati Langkat tahun 2012 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS
- 7) Surat Keputusan Bupati Langkat No. 451.11-15/K/2016

#### 4. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

## 5. Uraian Tugas

### a. Wakil Ketua I :

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

Fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Muzakki
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota

### b. Wakil Ketua II :

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian pendayagunaan zakat

Fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

### **c. Wakil Ketua III**

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- 2) Penyusunan rencana tahunan baznas kabupaten/kota
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
- 4) Pelaksanaan system akuntansi baznas kabupaten/kota
- 5) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja baznas kabupaten/kota
- 6) Penyiapan penyusun laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten zakat/kota
- 7) Pelaksanaan pengelolaan keuangan baznas kabupaten/kota

### **d. Wakil Ketua IV**

Bagian Administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil baznas kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

Fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil baznas kabupaten/kota
- 2) Pelaksanaan perencanaan amil baznas kabupaten/kota
- 3) Pelaksanaan rekrutmen amil baznas kabupaten/kota
- 4) Pelaksanaan pengembangan amil baznas kabupaten/kota
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran baznas kabupaten/kota
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat baznas kabupaten/kota
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat baznas kabupaten kota
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset baznas kabupaten/kota
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota

## **B. Hasil Penelitian**

### **1) Kualitas Sumber Daya Manusia**

#### **a. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Pada Bagian Keuangan Sudah Sesuai Dengan Kompetensinya**

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan karyawan bagian keuangan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber yang ada di Badan Amil Zakat Nasional di Kab.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam perusahaan untuk menunjang keberlangsungan usaha serta mewujudkan tercapainya tujuan suatu perusahaan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat pada bagian keuangan adalah pegawai yang harus memiliki kualitas yang baik, guna menunjang pekerjaannya. Terdapat kesesuaian antara tugas yang diemban pegawai keuangan dengan latar belakang pegawai seperti pendidikan, pengetahuan, dan keahliannya. Dengan latar belakang tersebut, maka pegawai akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang ditargetkan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat melalui wawancara langsung kepada narasumber. Adapun latar belakang tingkat pendidikan pegawai di Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat pada bagian keuangan sudah sesuai dengan kompetensinya. Narasumber mengatakan Pendidikan pegawai Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat pada bagian keuangan menjadi salah satu *job specification* dalam perencanaan pekerjaan pegawai Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat hal ini dikarenakan bahwa seorang pegawai yang bekerja di bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat memang harus mempunyai tingkat kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

#### **b. Perusahaan selalu memberikan pendidikan dan pelatihan karyawan bagian keuangan agar dapat meningkatkan kualitas *skill* karyawan.**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini di karenakan manusia

adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Sumber daya manusia dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang ditanganinya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesopanan dalam komunikasi baik bahasa, raut muka dan bahasa tubuh.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara di Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat pada bagian keuangan yang disampaikan oleh narasumber, dapat disimpulkan BAZNAZ memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas *skill* karyawan bagian keuangan di Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat dengan melakukan empat tahapan sebagai berikut: Pertama melakukan pembinaan karyawan untuk meningkatkan kualitas melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta disiplin dan etos kerja. Dimana Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat melakukan berbagai macam kegiatan seperti *tour of area* dan *tour of duty*. Kedua melakukan pembinaan dan pendidikan karyawan, dimana dapat meningkatkan profesionalisme kerja dan pegawai memiliki wawasan yang luas. Ketiga pengadaan karyawan, dimana Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat tidak dilibatkan secara langsung terhadap pengadaan karyawan, hal ini dikarenakan menjadi kewenangan pusat. Seharusnya Badan Amil Zakat dapat dilibatkan secara langsung dalam pengadaan karyawan yang akan bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat, karena aparatur Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat mengetahui kriteria calon karyawan yang bagaimana yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat. Keempat melakukan tindakan disiplin karyawan, adanya tindakan disiplin berupa teguran dan pemecatan terhadap karyawan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, merupakan tindakan yang benar untuk memotivasi karyawan supaya mematuhi segala peraturan yang berlaku.

**c. Karyawan pernah melakukan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.**

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk output dari hasil akhir proses akuntansi yang menjadi salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara benar sesuai standar yang ada di Badan Amil Zakat Kab. Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa siklus akuntansi yang ada pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat pada dasarnya hampir memenuhi kebijakan dalam proses penyusunan laporan keuangan, namun ada beberapa tahap yang belum sesuai bahkan tidak dilakukan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan pencatatan pada laporan keuangan di Badan Amil Zakat Kab. Langkat.

Mengacu pada penjelasan narasumber tersebut, Badan Amil Zakat Kab. Langkat telah melaksanakan prinsip pencatatan dengan menerapkan keterbukaan antar sesama karyawan pada bagian keuangan di Badan Amil Zakat Kab. Langkat dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

**2) Penerapan Teknologi Informasi**

**a. Karyawan bagian keuangan menguasai sistem informasi akuntansi**

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) itu adalah suatu subsistem dari system informasi manajemen (SIM) yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh rutin atas transaksi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi bisa berupa kertas dan alat tulis (manual) maupun terkomputerisasi penuh (serba otomatis) atau kondisi diantara keduanya (gabungan manual dan komputerisasi). Teknologi hanyalah alat untuk menyusun, memelihara, ataupun menyempurnakan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan. Narasumber mengemukakan suatu hal bahwa penomoran formulir bukti penerimaan dana masih ditulis secara manual bahkan ada yang tidak

menggunakan penomoran dalam pencatatan penerimaan dana. Secara administrasi menurut narasumber tersebut merupakan kesalahan dasar yang seharusnya tidak terjadi. Karena efek kesalahan tersebut dapat menimbulkan masalah serius seperti halnya potensi manipulasi, juga dapat menimbulkan persepsi negatif oleh masyarakat tentang profesionalitas. Selanjutnya, narasumber juga menemukan proses manajemen data yang kurang efektif, dan efisien pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat, yakni proses pencatatan dalam setiap transaksi mayoritas masih menggunakan sistem manual bahkan program aplikasi yang sudah diberikan oleh Badan Amil Zakat Kab. Langkat tidak digunakan.

Berdasarkan penjelasan narasumber tentang sistem informasi akuntansi yang ada pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa masih ada karyawan yang tidak menguasai sistem informasi akuntansi sehingga penerapan teknologi pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat tersebut belum berjalan efektif dan efisien sesuai fungsinya.

**b. Teknologi informasi yang digunakan memberikan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi.**

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula menjadi perhatian :

- 1) Bagian akuntansi keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan

- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa model akuntansi memungkinkan dua bentuk pemrosesan, yaitu pemrosesan transaksi dan pemrosesan informasi.

Berdasarkan pemaparan narasumber tentang pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target namun, karyawan pada bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat belum memanfaatkan dengan baik teknologi tersebut.

Pemrosesan akuntansi yang ada pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat kebanyakan masih dilakukan menggunakan sistem yang sangat manual walaupun sebagian kecil ada yang masih menggunakan sistem komputerisasi. Dari semua tempat penelitian, sistem yang sudah disediakan oleh Badan Amil Zakat Kab. Langkat yang berbentuk *software* pencatatan akuntansi tidak digunakan oleh karyawan pada bagian keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat.

Pemrosesan informasi yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat berawal dari siklus transaksi yang terjadi baik dari siklus penerimaan maupun penyaluran dana ZIS. Dari siklus tersebut tentunya didapati beberapa proses transaksi yang kemudian diolah menjadi sebuah laporan keuangan. Dari laporan keuangan inilah BAZ di Kab. Langkat melaporkan kepada pihak-pihak terkait baik melalui LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) maupun laporan keuangan yang dimasukkan majalah sehingga nantinya akan bermanfaat.

### **3) Sistem Pengendalian Internal**

#### **a. Kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun. Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin dari pemerintah maka laporan keuangan LAZ untuk dua tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun provinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

Berdasarkan pemaparan narasumber tentang pencatatan dan pelaporan keuangan data transaksi zakat pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa BAZNAS memeriksa ulang akan kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan yang akan diaudit oleh akuntan publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

#### **b. Sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan.**

Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik

mengenai pengendalian internal penting bagi akuntan yang berperan sebagai manajer, pengguna, perancang, dan evaluator sistem akuntansi. Tanggung jawab manajer atas pengendalian internal telah dibuat secara eksplisit di Undang-Undang Sarbanes-Oxley Tahun 2002 dan Standar No. 2 *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB). Standar No. 2 mengharuskan manajemen untuk membuat sebuah pertanyaan yang menjelaskan dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan.

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat memahami sistem pengendalian internal. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengembangkan laporan manajemen yang menilai pengendalian internal, saat ini diharuskan oleh Standar PCAOB No. 2. Auditor eksternal perlu memahami pengendalian internal sehingga dapat menyusun atestasi atas pernyataan manajemen mengenai pengendalian internal sebagaimana diharuskan oleh standar tersebut. Tentu saja, auditor eksternal perlu memahami pengendalian internal sehingga mereka dapat melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Standar audit yang berlaku umum memiliki banyak ketentuan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman memadai mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit. Konsep, Tujuan dan Unsur Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal (*internal control system*) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tempat tujuan umumnya Menjaga aktiva perusahaan, Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Tujuan utama pengendalian internal adalah meyakinkan Keandalan (*reliabilitas dan integritas*) informasi, Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, Perlindungan terhadap harta organisasi, Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan lima unsur pengendalian internal (*element sof internal control*) untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut adalah, Lingkungan pengendalian,

Penilaian atau penetapan risiko, Prosedur pengendalian, Pemantauan (monitoring), Informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa karena kualitas sumber daya manusia yang tidak merata dalam memahami PSAK terkait. Badan Amil Zakat Nasional mengacu pada PSAK 45 dan PSAK 109 untuk lembaga nirlaba dan Zakat. Rekomendasi, tindakan atau hasil dari Internal Audit di rekomendasikan kepada pihak manajemen guna pengambilan keputusan. Rekomendasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas lembaga baik dari karyawan, keuangan dan kepatuhan lembaga itu sendiri. Laporan keuangan BAZNAS dapat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, diterbitkan laporan auditor independen dengan jasa akuntan publik.

Berdasarkan pemaparan narasumber tentang sistem pengendalian internal pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat.

#### **4) Penyajian Laporan Keuangan**

##### **a. Penyajian laporan keuangan yang disusun setiap periodenya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa sistem pengendalian informasi sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dalam proses pelaporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, Organisasi Penyaluran Zakat (OPZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Organisasi Penyaluran Zakat (OPZ) yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk Organisasi Penyaluran Zakat

(OPZ). Sampai akhirnya pada tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).

Laporan keuangan yang disusun BAZNAS setiap periodenya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan tahunan saat ini harus mencakup pernyataan bahwa manajemen dasar yang diberdayakan untuk mengajukan standar audit perusahaan publik. Audit atas Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan yang dilakukan dalam hubungannya dengan Audit Laporan Keuangan. Standar ini disetujui oleh SEC, 17 Juni 2004, pernyataan yang mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi pengendalian internal, penilaian atas pengendalian internal dan pengungkapan adanya kekurangan material, dan pernyataan bahwa kantor akuntan publik telah menerbitkan laporan penilaian manajemen terhadap pengendalian internal. Karyawan juga harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga dapat ditetapkan dengan tepat. Sebagai contoh, kebijakan manajemen mungkin mengharuskan bahwa detail faktur harus diverifikasi terhadap slip pengepakan dan pesanan pembelian (PO). Pengendalian seperti itu dikatakan efektif hanya jika seseorang yang bertanggungjawab atas pencatatan faktur memahami dan melakukan verifikasi ini. Akuntan juga memiliki peran penting sebagai perancang prosedur pengendalian internal yang mendorong ketaatan terhadap peraturan dan sasaran perusahaan. Akuntan harus menilai risiko atas tidak tercapainya sasaran perusahaan dan sasaran pengendalian internal serta memilih atau merencanakan pengendalian internal yang dapat mengurangi risiko.

**b. Badan Amil Zakat Kab.Langkat menyajikan laporan perubahan aset kelolaan setiap periodenya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa fungsi kedua sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) melibatkan beberapa aktivitas yaitu membuat neraca saldo dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit akuntansi, Melakukan penyesuaian yaitu mencatat transaksi-transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca (Laporan

perubahan posisi keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut PSAK 109 disebutkan bahwa entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada Aset, Kewajiban, dan Saldo dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir.

Berdasarkan pemaparan narasumber tentang penyajian laporan perubahan aset kelolaan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa bagian keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir setiap periodenya.

**c. Karyawan bagian keuangan selalu menyerahkan laporan keuangan baznas setiap akhir periode.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa karyawan keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, BAZ (Badan Amil Zakat) hanya menyajikan Neraca dan Laporan Sumber dan Perubahan Dana. Menurut PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan tidak disajikannya laporan keuangan secara lengkap, mengakibatkan informasi yang didapat sangat terbatas.

Berdasarkan pemaparan narasumber tentang penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa bagian keuangan

Badan Amil Zakat Kab. Langkat menyerahkan laporan keuangan BAZNAS setiap akhir periode dengan tepat waktu yaitu laporan yang meliputi laporan Posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

#### **5) Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber di Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengatakan bahwa pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat berdasarkan PSAK No. 109 dan teori tentang Akuntansi Zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. pengakuan dan pengukuran penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah Badan Amil Zakat Kab. Langkat yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Kab. Langkat telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzakki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS. Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Berdasarkan pemaparan narasumber tentang peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat dapat disimpulkan bahwa bagian keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 agar mengetahui implementasi akuntansi zakat dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pencatatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat pada saat transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, maka Badan Amil Zakat Nasional

Kab. Langkat melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) pada buku harian kas zakat, infaq/shadaqah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, infaq/shadaqah. Metode *cash basic* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK No. 109 (paragraf 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program General Ledger (GL)

Penyajian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun lima komponen laporan keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana dan laporan arus kas masih belum informatif.

Pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang didalamnya terdiri atas variabel penelitian. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai kepada salah satu narasumber pada Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang

jawaban narasumber tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

### **1) Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu bangsa atau negara, dan hanya dari sumber daya manusia lah yang berkualitas tinggi yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

SDM merupakan salah satu faktor dalam perubahan suatu perekonomian Indonesia. Bagaimana cara SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing ini mampu untuk bekerja. Keterkaitan dengan hal itu adapun kondisi atau masalah yang masih membelengu sampai sekarang ini, yakni mengenai kemiskinan yang melanda Indonesia. Dapat diketahui, kurangnya lapangan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi juga termasuk dampak dari kemiskinan, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan kesempatan kerja rendah terutama bagi perguruan tinggi, yang mana tak sesuai dengan target. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi tetap saja kesempatan kerja rendah.

Ada banyak lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan. Badan amil zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi. berdasarkan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Pasal 21, 22, 23, 24 KMA No. 581 Tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan

ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pasal 8 dan 9 UU, Pasal 1 KMA).

Latar belakang tingkat pendidikan pegawai di Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat pada bagian keuangan sudah sesuai dengan kompetensinya. Pendidikan pegawai Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat pada bagian keuangan menjadi salah satu *job specification* dalam perencanaan pekerjaan pegawai Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat hal ini dikarenakan bahwa seorang pegawai yang bekerja di bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat memang harus mempunyai tingkat kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

BAZNAS memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas *skill* karyawan bagian keuangan di Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat dengan melakukan pembinaan karyawan untuk meningkatkan kualitas melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta disiplin dan etos kerja, melakukan pembinaan dan pendidikan karyawan, dimana dapat meningkatkan profesionalisme kerja dan pegawai memiliki wawasan yang luas, pengadaan karyawan dimana Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat tidak dilibatkan secara langsung terhadap pengadaan karyawan, melakukan tindakan disiplin karyawan. Adanya tindakan disiplin berupa teguran dan pemecatan terhadap karyawan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, merupakan tindakan yang benar untuk memotivasi karyawan supaya mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Badan Amil Zakat Kab. Langkat pada dasarnya hampir memenuhi kebijakan dalam proses penyusunan laporan keuangan, namun ada beberapa tahap yang belum sesuai bahkan tidak dilakukan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan pencatatan pada laporan keuangan di Badan Amil Zakat Kab. Langkat. Pencatatan laporan keuangan menerapkan keterbukaan antar sesama karyawan pada bagian keuangan di Badan Amil Zakat Kab. Langkat dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

## 2) Penerapan Teknologi Informasi

Mekanisme penentuan jumlah zakat dalam hal ini adalah penentuan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki. Hal ini merupakan salah satu bentuk layanan BAZ dan LAZ yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para muzakki yang belum memahami dalam penghitungan zakat yang harus dibayarkan. Dengan demikian diharapkan kegiatan pengumpulan zakat dapat dilakukan secara efektif. Berkaitan dengan penentuan jumlah zakat yang harus digunakan, pengelola BAZ dan LAZ menawarkan empat opsi. Opsi pertama yaitu melalui konsultasi online. Muzakki dapat berkonsultasi dengan para pengelola BAZ dan LAZ secara online atau melalui media internet. Opsi pertama ini cukup efektif karena muzakki dapat memperoleh informasi mengenai penghitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan tanpa terhambat oleh jarak dan waktu. Selain itu, pihak BAZ dan LAZ dapat menjangkau dimana pun muzakki berada. Dukungan ketersediaan teknologi, kemampuan dan keahlian pengelola BAZ, LAZ, dan muzakki terkait dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet menjadi faktor penting. Opsi kedua yakni melalui simulasi penghitungan zakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat. Opsi ini dapat dilakukan apabila para muzakki hendak membayarkan zakat secara online (melalui internet). Pengelola BAZ dan LAZ menyajikan menu simulasi penghitungan zakat dalam website.

Dengan demikian, muzakki dapat mengetahui jumlah zakat yang harus dibayarkan. Opsi ketiga yaitu muzakki menghitung sendiri jumlah kewajiban zakatnya. Hal ini dapat dilakukan apabila muzakki memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan penghitungan kewajiban zakat. Namun demikian, apabila muzakki masih menemui kesulitan dalam menghitung kewajiban zakatnya, pengelola BAZ dan LAZ dapat membantu muzakki untuk menghitung kewajiban zakatnya. Opsi keempat yaitu muzakki dapat meminta pengelola BAZ dan LAZ untuk menghitung kewajiban zakatnya. Opsi ini dilakukan apabila muzakki belum tahu dan belum paham tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus dibayar. Dalam hal ini muzakki dapat mendatangi kantor BAZ dan LAZ terdekat atau dapat berinteraksi dan berkomunikasi melalui media internet (chatting), email, telepon, atau SMS.

Mekanisme pengumpulan/pemungutan zakat berhubungan dengan tata cara penyetoran atau pembayaran kewajiban zakat. Berdasarkan jawaban para responden, mekanisme pengumpulan/ pemungutan zakat yang telah dilakukan yaitu; pertama, pengumpulan atau pemungutan secara online. Metode pembayaran yang dapat dipilih oleh muzakki antara lain melalui transfer ke rekening BAZ dan LAZ, *payroll system*, transfer melalui perbankan syariah. Cara ini lebih efektif mengingat para muzakki tidak selalu memiliki waktu luang untuk mendatangi kantor BAZ dan LAZ karena alasan kesibukan. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mekanisme pembayaran online lebih memudahkan para muzakki untuk menunaikan kewajibannya tanpa dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu. Kedua, pihak BAZ dan LAZ mengambil zakat dengan cara mendatangi muzakki. Dalam hal ini, pihak BAZ dan LAZ menyediakan layanan jemput zakat. Media komunikasi yang dapat digunakan yaitu melalui telepon, sms, atau email. Pengambilan zakat ke tempat muzakki dapat dilakukan oleh bendahara, juru pungut (*fundrasing*), atau staf BAZ dan LAZ yang ditunjuk oleh pimpinan. Ketiga, muzakki dapat membayar zakat ke kantor BAZ dan LAZ. Hal ini dapat dilakukan apabila muzakki berada di lokasi yang berdekatan dengan kantor BAZ dan LAZ atau berada pada jarak yang sangat terjangkau.

Pengawasan pengelolaan zakat difokuskan pada aspek legalitas pengelolaan zakat, kepatuhan pada ketentuan agama dan ketepatan sasaran (muzakki), penghitungan kewajiban zakat, dan keefektivan pengumpulan zakat. Pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus harian, dewan syariah, dewan pengurus, dewan pembina, auditor internal dan eksternal, dan pimpinan.

Penerapan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Langkat belum memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, hal ini dikarenakan penomoran formulir bukti penerimaan dana pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat masih ditulis secara manual bahkan ada yang tidak menggunakan penomoran dalam pencatatan penerimaan dana. Proses manajemen data pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat, yakni proses pencatatan dalam setiap transaksi mayoritas masih menggunakan sistem manual bahkan program aplikasi yang sudah diberikan oleh Badan Amil Zakat Kab. Langkat tidak digunakan. Teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi dan

pemrosesan informasi pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat memberikan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian.

### **3) Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal pada generasi pertama dinamakan sistem pengendalian internal, sistem pengawasan dan struktur pengendalian internal. Penambahan kata (istilah) sistem disebabkan pengendalian internal memiliki elemen input, proses dan output seperti halnya sistem lain. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah pengendalian internal.

Berdasarkan pernyataan diatas audit internal dikatakan memadai apabila dapat mencapai tujuan pengendalian internal yaitu Keandalan Laporan Keuangan Pengendalian yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak eksternal. Penyajian laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan PSAK dimana manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar, Ketaatan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku Pengendalian internal yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang berlaku telah ditaati, Efektifitas dan Efisiensi Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan tugas bukan berarti tidak ada koordinasi. Jadi, pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien dan pengamanan aktiva dan pencatatannya.

Kualitas sumber daya manusia yang tidak merata dalam memahami PSAK terkait. Badan Amil Zakat Nasional mengacu pada PSAK 45 dan PSAK 109 untuk lembaga nirlaba dan Zakat. Rekomendasi, tindakan atau hasil dari Internal Audit di rekomendasikan kepada pihak manajemen guna pengambilan keputusan. Rekomendasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas lembaga baik dari karyawan, keuangan dan kepatuhan lembaga itu sendiri. Laporan keuangan BAZNAS dapat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, diterbitkan laporan auditor independen dengan jasa akuntan publik.

Badan Amil Zakat Kab. Langkat mengenai sistem pengendalian internal sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat. Pencatatan dan pelaporan keuangan data transaksi zakat pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat memeriksa ulang akan kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan yang akan diaudit oleh akuntan publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

#### **4) Penyajian Laporan Keuangan**

Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah adalah sebuah social enterprise, yang harus dikelola secara profesional, memiliki laporan keuangan yang terpercaya, ter-audit, dan bisa diakses oleh publik, di mana itu semua adalah pondasi dari good corporate governance. Organisasi profit dan non profit harus memiliki strategi dalam pengelolaannya. Walaupun antara keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama menghadapi persaingan.

Persaingan dengan organisasi lain dan persaingan dengan organisasi sejenis dalam memperebutkan pasar. Misalnya, satu lembaga pengelola zakat akan bersaing dengan lembaga zakat lain untuk memperebutkan donatur. Persamaan berikutnya adalah secara akuntansi keduanya memperoleh pendapatan, menanggung beban finansial untuk operasional organisasi dan dituntut ada selisih positif antara pendapatan dan beban.

Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal penggunaan laba. Laba pada organisasi profit boleh diambil dan dibagikan kepada pemilik atau penanam modal. Namun untuk organisasi non profit tidak ada pemiliknya sehingga laba tidak boleh diambil atau dibagikan kepada siapapun. Laba akan selalu menjadi capital expenditure. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan memiliki laporan keuangan yang terpercaya pada organisasi non profit khususnya lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka mereka diharuskan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Laporan keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat setiap periodenya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan tahunan saat ini harus mencakup pernyataan bahwa manajemen dasar yang diberdayakan untuk mengajukan standar audit perusahaan publik. Audit atas Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan yang dilakukan dalam hubungannya dengan Audit Laporan Keuangan. Badan Amil Zakat Kab. Langkat menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, tetapi tidak terbatas pada Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir setiap periodenya.

#### **5) Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan**

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, Pasal 2, selama itu tidak sesuai dengan prinsip Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat maka itu tidak bisa dilakukan. Walaupun lembaga ini 50 merupakan lembaga yang didirikan melalui pemerintah, akan tetapi selama ini program dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat bebas dari intervensi pihak manapun. Akan tetapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan sangat memengaruhi kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat sendiri. Karena secara umum target utama pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat adalah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengupayakan instansi-instansi pemerintah seperti Kantor, Dinas, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penunaian zakat. Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat diatur dalam UU. Nomor 23 tahun 2011, paling tidak terdiri atas tiga orang dari unsur pemerintahan yang ditunjuk dari kementerian/instansi yang terkait dengan pengelolaan zakat, dan delapan orang dari unsur masyarakat, yakni dari: unsur ulama, profesional, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dari SDM sisi pengelola, staf atau karyawan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat merupakan tenaga profesional yang bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan prinsip Independent atau mandiri Badan Amil Zakat Nasional Kab.

Langkat telah mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumberdaya dan distribusi ZIS yang tidak menimbulkan ketergantungan. Mobilisasi sumberdaya sendiri merupakan suatu kegiatan yang meliputi penggalangan, pengelolaan, dan pendistribusian sumber daya publik untuk tujuan kemanusiaan. Poin penting dari prinsip ini adalah adanya sumberdaya yang jelas dan berkelanjutan baik bersifat materi dan non materi. Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat telah 51 mempunyai sumberdaya yang cukup baik. Dengan sistem manajerial yang baik dalam pengelolaan, maka akan dapat menjaga kelangsungan dari Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat.

Bagian Keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat yang berdasarkan PSAK No. 109 agar mengetahui implementasi akuntansi zakat dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. PSAK 109 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat. Ketetapan tersebut berlaku Sejak 11 Januari 2012. PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS di Kab.Langkat terdiri dari:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Kab. Langkat sudah memadai, karena latar belakang pendidikan karyawan sudah pada tingkat sarjana dan sesuai dengan kompetensinya, perusahaan juga memberikan pendidikan dan pelatihan pada bagian keuangan, namun ada beberapa tahap yang belum sesuai bahkan tidak dilakukan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan pencatatan pada laporan keuangan di Badan Amil Zakat Kab. Langkat. Pencatatan laporan keuangan menerapkan keterbukaan antar sesama karyawan pada bagian keuangan di Badan Amil Zakat Kab. Langkat dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.
2. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Langkat belum memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, hal ini dikarenakan penomoran formulir bukti penerimaan dana pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat masih ditulis secara manual bahkan ada yang tidak menggunakan penomoran dalam pencatatan penerimaan dana. Proses manajemen data pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat, yakni proses pencatatan dalam setiap transaksi mayoritas masih menggunakan sistem manual bahkan program aplikasi yang sudah diberikan oleh Badan Amil Zakat Kab. Langkat tidak digunakan. Teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi dan pemrosesan informasi pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat memberikan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian.
3. Sistem pengendalian Internal Badan Amil Zakat Kab. Langkat sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan pada Badan Amil Zakat Kab.

Langkat. Pencatatan dan pelaporan keuangan data transaksi zakat pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat memeriksa ulang akan kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan yang akan diaudit oleh akuntan publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

4. Penyajian Laporan keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat setiap periodenya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Audit atas Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan yang dilakukan dalam hubungannya dengan Audit Laporan Keuangan. Badan Amil Zakat Kab. Langkat menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, tetapi tidak terbatas pada Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir setiap periodenya.
5. Bagian Keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat yang berdasarkan PSAK No. 109 dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

## **B. Saran**

1. Dalam pendayagunaan zakat produktif diharapkan lebih dimaksimalkan lagi pengelolaannya, agar tujuan memuzakkikan mustahik dapat tercapai dengan baik. Kedepannya badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat sebaiknya memberikan jalan ataupun fasilitas kepada usaha binaan untuk pemasaran produknya. Ketika pemasaran maksimal dan mendapatkan keuntungan sehingga perekonomian mustahik meningkat dan menjadi sumber pendapatan. Maka para mustahik tersebut bisa menjadi muzakki untuk membayar zakat, infak dan sedekah.
2. Perlunya inovasi baru dalam rangka peningkatan pelayanan dan kualitas transparansi kepada publik, dengan harapan agar lebih gencardalam melakukan sosialisasi tentang keberadaan BAZNAS yang merupakan badan amil zakat bentukan pemerintah. Hal ini tentunya akan dapat menarik minat

masyarakat untuk menyalurkan zakatnya serta menumbuhkan *image* positif sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan.

3. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BAZNAS dengan diadakannya berupa pelatihan-pelatihan khusus yang ditujukan untuk mengantisipasi tantangan pengelolaan zakat yang dihadapi kedepannya. Hal ini akan mencerminkan sebagai amil yang *capable* yang dapat menjaga keberlangsungan dan eksistensi BAZNAS dalam kancah perzakatan nasional.
4. Dengan adanya pengendalian terhadap sistem yang mengintegrasikan data pengelolaan ZIS BAZNAS Daerah dengan BAZNAS Pusat, maka akan dapat mengurangi kesalahan dalam input data serta dapat meminimalisir adanya manipulasi atau duplikasi data. Oleh karenanya, sistem verifikasi data pada SIMBAZNAS diupayakan agar lebih ditingkatkan secara maksimal sehingga dapat menjamin kevalidan terhadap data pengelolaan ZIS yang dikelola.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Surya Nanda dan Rachman Indrarini. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil ZaKat, Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah". *Jurnal Akuntansi SI Universitas Negeri Surabaya Vol 8 No 2, 2017.*
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rnika Cipta, 2006.
- Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta dan Made Bagus Febrianto. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD. *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol.3 No.15, 2017.*
- Heri. *Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2011.
- Hisamuddin, Nur. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember Vol.10 No.18, 2002.*
- Marliyati, Nikmatuniayah. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal SI Akuntansi Politeknik Negeri Semarang Vol.14 No.7, 2015.*
- Muslim A.Djalil, Darwanis dan Arsyiati. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Jawaban Keuangan PNPB Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah. *Jurnal SI Akuntansi UIN SUSKA RIAU Vol.23 No.18, 2008.*
- M. Rasuli, Ria Nelly Sari dan Desi Fatimah. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Genesha Vol.10. No.19, 2014.*
- Nalurita, Nuhoni. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, dan Karakteristik Daerah Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi Universitas Sebelas Maret Jurusan Akuntansi SI, 2015.*
- Nasar Fuad.M. Peran BAZNAS Sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan. Didapat dari: pusat.baznas.go.id diakses tanggal 3 juli 2015.

- Prayudi, Restu. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Skripsi UIN SUSKA RIAU Jurusan Akuntansi SI, 2013.*
- Risal, Fathanul. <http://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah-terhadap-baz-dan-laz>. Artikel (Diakses tanggal 24 juni 2015).
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam. Diakses dari: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11096166.pdf>. Diakses tanggal 08 oktober 2012.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: PT. Renika Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2011.
- Sukaesih, Siti. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SI Akuntansi Universitas Malang Vol. 24 No. 12, 2005.*
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2009.
- Tupi Setyowati, Faizal Ridwan, Eti Rochaety. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002.



**BAZNAS**  
**Badan Amil Zakat Nasional**  
**KABUPATEN LANGKAT**

Sekretariat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 03 Kec. Stabat Kab. Langkat KodePos : 20811 Telp./Fax : 061-8910653

Nomor : 06 /SB/B.1/2018

Stabat, 01 Maret 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Konfirmasi Permohonan Riset**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Di -

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Agama Islam Nomor: 27/IL.3/UMSU-01/F/2018 Tanggal 06 Februari 2018 Perihal Permohonan Pelaksanaan Riset di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : **NURAINUN**

NPM : 14012700018

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Riset (Penelitian) di Kantor BAZNAS Langkat terhitung mulai 01 Maret 2018.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



AN. KETUA  
WAKIL KETUA IV  
(Bag. ADM, SDM dan UMUM)

H. M. JAMIL, SE



**BAZNAS**  
**Badan Amil Zakat Nasional**  
**KABUPATEN LANGKAT**

Sekretariat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 03 Kec. Stabat Kab. Langkat KodePos : 20811 Telp./Fax : 061-8910653

**SURAT KETERANGAN**  
**No. : // / SB / B.1 / 2018**

Yang bertandatangan dibawah ini Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi, SDM dan UMUM) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat menerangkan bahwa :

Nama : **NURAINUN**  
NPM : 14012700018  
Tempat/Tgl Lahir : Sipolu-polu, 12-08-1995  
Semester / Jurusan : VII / Perbankan Syariah  
Alamat : Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal  
Judul Skripsi : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS di Kabupaten Langkat"

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan riset (Penelitian) di Kantor BAZNAS Langkat sejak tanggal 05 Maret 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 6 Maret 2018

**AN. KETUA**  
**WAKIL KETUA IV**  
**(Bag. ADM, SDM dan UMUM)**



**H. M. JAMIL, SE**

**DAFTAR  
PERTANYAAN WAWANCARA**



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MENGANALISIS  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI  
KAB.LANGKAT”, DIMANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KAB.LANGKAT MENJADI OBJEK PENELITIAN**

**OLEH:**

**NUR AINUN  
1401270018**

Wawancara ini disusun dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Di Kab.Langkat.

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Drs. Mukhtar N.  
Hari/Tanggal : Selasa, 06 Maret 2018  
Waktu : 10.00 – 01.00 WIB  
Lokasi : Kantor BAZNAS KAB. LANGKAT

Berikut adalah pertanyaan dan jawaban antara penelitian dengan Kepala Bagian Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Di Kab.Langkat.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MENGANALISIS  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI  
KAB.LANGKAT, DIMANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KAB.LANGKAT MENJADI OBJEK PENELITIAN**

**INDIKATOR:**

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Penerapan teknologi informasi
3. Sistem pengendalian Internal
4. Penyajian Laporan keuangan
5. peraturan perundang-undangan

No	Butiran Wawancara	Jawaban Responden
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah latar belakang pendidikan karyawan pada bagian keuangan sudah sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>2. Apakah perusahaan selalu memberikan pendidikan dan pelatihan karyawan bagian keuangan agar dapat meningkatkan kualitas skill karyawan.</li> <li>3. Apakah karyawan pernah melakukan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Pada Bagian Keuangan Sudah Sesuai Dengan Kompetensinya. latar belakang pendidikan karyawan sudah pada tingkat sarjana dan sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>2. Baznas selalu memberikan pendidikan dan pelatihan karyawan bagian keuangan agar dapat meningkatkan kualitas skill karyawan, dengan melakukan empat tahapan, Pertama melakukan pembinaan karyawan untuk meningkatkan kualitas melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta disiplin dan etos kerja. Dimana Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat melakukan berbagai macam kegiatan seperti <i>tour of area</i> dan <i>tour of duty</i>. Kedua melakukan pembinaan dan pendidikan karyawan, dimana dapat meningkatkan profesionalisme kerja dan pegawai memiliki wawasan yang luas. Ketiga pengadaan karyawan, dimana Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat tidak dilibatkan secara langsung terhadap pengadaan karyawan, hal ini dikarenakan menjadi kewenangan pusat. Seharusnya Badan Amil Zakat dapat dilibatkan secara langsung</li> </ol>

		<p>dalam pengadaan karyawan yang akan bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat, karena aparatur Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat mengetahui kriteria calon karyawan yang bagaimana yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat. Keempat melakukan tindakan disiplin karyawan, adanya tindakan disiplin berupa teguran dan pemecatan terhadap karyawan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, merupakan tindakan yang benar untuk memotivasi karyawan supaya mematuhi segala peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Karyawan pernah melakukan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.</p>
2	<p>1. Sehubungan dengan penerapan teknologi informasi, apakah karyawan bagian keuangan menguasai sistem informasi akuntansi?</p> <p>2. Apakah teknologi informasi yang digunakan memberikan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi.</p>	<p>1. Karyawan bagian keuangan belum menguasai sistem informasi akuntansi. penomoran formulir bukti penerimaan dana masih ditulis secara manual.</p> <p>2. Teknologi informasi memberikan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target.</p>
3	<p>1. Dalam pencatatan dan pelaporan keuangan baznas data transaksi zakat yang dilakukan pemeriksaan ulang akan kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan.</p> <p>2. Apakah sistem pengendalian internal perusahaan sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan.</p>	<p>1. BAZNAS memeriksa ulang akan kebenaran pencatatan keuangan yang dilakukan karyawan bagian keuangan yang akan diaudit oleh akuntan publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.</p> <p>2. Sistem pengendalian internal sudah efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan pada</p>

		Badan Amil Zakat Kab. Langkat.
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penyajian laporan keuangan yang disusun setiap periodenya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).</li> <li>2. Apakah baznas Kab.Langkat menyajikan laporan perubahan aset kelolaan setiap periodenya.</li> <li>3. Apakah karyawan bagian keuangan selalu menyerahkan laporan keuangan baznas setiap akhir periode dengan tepat waktu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan yang disusun BAZNAS setiap periodenya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.</li> <li>2. Badan Amil Zakat Kab.Langkat menyajikan laporan perubahan aset kelolaan setiap periodenya.</li> <li>3. Bagian keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat menyerahkan laporan keuangan BAZNAS setiap akhir periode dengan tepat waktu yaitu laporan yang meliputi laporan Posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.</li> </ol>
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam menyusun laporan keuangan apakah baznas taat terhadap peraturan Undang-undang Dasar RI khususnya yang mengatur keuangan negara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Keuangan Badan Amil Zakat Kab. Langkat telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kab. Langkat yang berdasarkan PSAK No. 109 dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.</li> </ol>



Unggul Prestasi & Cita-cita  
 Jika memfotokopi surat ini agar disebutkan  
 Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada : Yth Dekan Fai UMSU  
 Di  
 Tempat

27 Muharam 1437 H  
 09 Nopember 2017 M

Dengan Hormat  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Ainun  
 Npm : 1401270018  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,00  
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kabupaten Langkat.	Procc 03/2017 ganti 27/11/2017	Irma Hayati, S.Pd., M.Si	23/12/17
2	Tingkat Kepuasan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.			
3	Peran Perbankan dalam Pembedayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat ( Study Bank Syariah Mandiri).			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

[Signature]  
 NURAINUN

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



Unggul, Cerdas & Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 27 /II.3/UMSU-01/F/2018  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

20 J Awal 1439 H  
06 Februari 2018 M

Kepada Yth : **Pimpinan BAZNAS Di Kab. Langkat**

Di  
Tempat.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Nurainun  
NPM : 1401270018  
Semester : VII  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kab. Langkat

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

CC. Fil



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
 Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Nama Mahasiswa : Nur Ainun  
 Npm : 1401270018  
 Semester : VII (tujuh)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS di Kabupaten Langkat.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28-12-2017	Perbaiki struktur penulisan skripsi Perbaiki kata pengantar, daftar isi, cover Perbaiki latar belakang masalah		
06-01-2018	Perbaiki tulisan salah ketik dan tulisan asing Perbaiki teori-teori penelitian Perbaiki penelitian terdahulu		
12-01-2018	Perbaiki kerangka berpikir Perbaiki metodologi penelitian		
18-01-2018	Perbaiki penulisan daftar pustaka		
24-01-2018	ACC Seminar Proposal		

Medan, 24 - 1 - 2018

**Diketahui/ Disetujui**  
**Ketua Program Studi**

Selamat Pohan, S.Ag, MA

**Pembimbing Proposal**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
 a menjawab surat ini agar disebutkan  
 mor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
 Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Nurainun  
**Npm** : 1401270018  
**Semester** : VII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kab. Langkat

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	ok
Bab I	Data tdk ada & tdk jelas
Bab II	Uraian konsep tdk jelas & arang/ tdk sen g jwb!
Bab III	Analisis data salim
Lainnya	Tdk pake Materi
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/> Penyes & 5 feb 2018

Medan, 31 Januari 2018

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembahas

(Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah** yang diselenggarakan pada Hari dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Nurainun  
**Npm** : 1401270018  
**Semester** : VII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kab. Langkat**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 29 Januari 2018

**Tim Seminar  
Ketua**

**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**Pembimbing**

**(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)**

**Pembahas**

**(Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)**

**Diketahui/ Disetujui  
A.n Dekan  
Wakil Dekan I**

**Zailani, S.PdI, MA**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Ainun

NPM : 1401270018

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  
Laporan Keuangan BAZNAS di Kab.Langkat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil tempahan (dibuat) pihak lain dan juga tidak tergolong **Plagiat**.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya akan bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Maret 2018

Hormat Saya



*Nur Ainun*  
Nur Ainun

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Nur Ainun  
Tempat, Tanggal Lahir : Sipolu-polu, 12 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara  
No. HP : 085760210544  
Email : hasibuan.nurainun95@gmail.com  
Alamat : Jl. Alfalah V No. 14

### ORANG TUA

Nama Ayah : Hasahatan Hasibuan  
Nama Ibu : Saniroh Lubis  
Alamat Orang Tua : Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kab.Mandailing  
Natal.

### PENDIDIKAN

1. Tahun 2001-2006 : SD Negeri 147552 Panyabungan Kota
2. Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 2 Panyabungan Kota
3. Tahun 2010-2013 : SMA 1 Panyabungan Kota
4. Tahun 2014-2018 : Tercatat sebagai mahasiswi Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam,  
Jurusan Perbankan Syariah

Demikian Daftar Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Medan, 15 Maret 2018

Penulis,



Nur Ainun

Medan, 15 Maret 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n Nur Ainun

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di –

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Nur Ainun** yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kab.Langkat.”** Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Isra Hayati S.Pd, M.Si**